

**ANALISIS YURIDIS PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS  
YANG BERUMUR 25 TAHUN OLEH NOTARIS PENERIMA  
PROTOKOL KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

**TESIS**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan  
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum*

*Universitas Andalas*



**Oleh :**

**VIDHEA ANUGRAENI**

**2020122012**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. DR. FERDI, S.H., M.H.**
- 2. DR. AZMI FENDRI, S.H., M.KN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

**ANALISIS YURIDIS PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG  
BERUMUR 25 TAHUN OLEH NOTARIS PENERIMA PROTOKOL KEPADA  
MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

**ABSTRAK**

Protokol Notaris harus disimpan oleh Notaris dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa protokol Notaris dari Notaris lain yang penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih, diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, namun ketentuan Pasal 63 Ayat (5) ini tidak terlaksana, berdasarkan uraian tersebut muncul permasalahan mengenai: 1) Mengapa Undang-Undang mengharuskan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah ? 2) Apakah Notaris penerima protokol berwenang dalam mengeluarkan salinan dari minuta akta yang telah berumur 25 tahun atau lebih yang tidak diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang menetapkan Notaris penerima protokol menyerahkan minuta akta yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah. 2) menganalisis kewenangan Notaris Penerima Protokol dalam mengeluarkan salinan minuta yang telah berumur 25 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Bahan utama penelitian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan undang-undang, literatur dan kajian hukum lain. Data primer dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, menggunakan analisa data kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Ketentuan pasal 63 UUJN tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan beberapa alasan yaitu faktor uujn tersebut dan faktor tempat penyimpanan, legal reason ditetapkan umur 25 tahun dari suatu akta ditinjau dari masa jabatan notaris, sebagai salah satu perlindungan hukum notaris kepada notaris lain dan dilihat dari daluwarsa, Majelis Pengawas Daerah hanya memiliki kewenangan dalam kegiatan preventif kegiatan administratif sehingga tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan salinan, Notaris Penerima Protokol berwenang mengeluarkan salinan dari minuta yang telah berumur 25 tahun yang tidak diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat penulis berikan bahwa seharusnya UUJN lebih mempertegas lagi terkait penjelasan dari pasal 63 UUJN tersebut.

Kata Kunci : *Penyimpanan, Notaris Penerima Protokol, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah*

# **JURIDICAL ANALYSIS OF NOTARY PROTOCOL STORAGE 25 YEARS OLD BY NOTARY RECEIVING PROTOCOL TO REGIONAL SUPERVISORY**

## **ASSEMBLY**

### **ABSTRACT**

The Notary Protocol must be kept by the Notary for an indefinite period. Article 63 Paragraph (5) of the Notary Position Law states that the Notary protocol from another Notary whose submission is 25 years old or older, is submitted to the Notary Regional Supervisory Council, but the provisions of Article 63 Paragraph (5) are not implemented, based on the description a problem arises. regarding: 1) Why does the law require that a notary protocol that is 25 years old is kept by the Regional Supervisory Council? 2) Does the Notary receiving the protocol have the authority to issue copies of the minutes of deed that are 25 years old or more that are not submitted to the Regional Supervisory Council. Based on the formulation of the problem above, the objectives to be achieved in this study are as follows: 1) To examine how the Law stipulates that the Notary who receives the protocol submits the minuta deed that is 25 years old or more to the Regional Supervisory Council. 2) analyze the authority of the Notary Recipient of the Protocol in issuing a copy of the minutes that is 25 years old. This study uses a normative juridical research approach. The main material of this research is secondary data obtained from various pre-existing data based on laws, literature and other legal studies. Primary data from primary, secondary and tertiary legal materials, using qualitative data analysis and presented in descriptive form. The results of this study indicate that: The provisions of Article 63 of the UUJN were not implemented properly, due to several reasons, namely the uujn factor and the storage place factor, the legal reason was set at 25 years of age from a deed in terms of the notary's term of office, as one of the legal protections of a notary to a notary and judging from the expiration date, the Regional Supervisory Council only has authority in preventive administrative activities so that it does not have the authority to issue copies, the Protocol Recipient Notary has the authority to issue a copy of the 25-year-old minuta which is not submitted to the Regional Supervisory Council. Based on the results of this study, the author can give suggestions that the UUJN should further emphasize the explanation of Article 63 of the UUJN.

*Keywords: Depository, Notary Recipient of Protocol, Notary Protocol, Regional Supervisory Council*

